

EVALUASI PROGRAM/PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKE DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN MP3EI 2011-2025 DI KORIDOR EKONOMI SUMATERA

Firrean Suprpto

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta

Alamat: Jalan Radin Inten II, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Email: firreansuprpto@gmail.com

Abstract: *Special Economic Zones (SEZ) is a region with certain limits within the jurisdiction of Indonesia which is set to perform economic functions and obtain certain facilities. One SEZ developed in North Sumatra Province and included in the National Strategic Area (KSN) Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo is SEZ Sei Mangke. SEZ Sei Mangke is defined in PP 29 of 2012 on 27 February 2012 and is the first KEK in Indonesia which was inaugurated its operation by President Joko Widodo on January 27, 2015. KSN Mebidangro itself is an area of priority spatial arrangement because it has a very important influence nationally against state sovereignty, defense and state security, economic, social, cultural, and / or environment, including areas designated as world heritage. This research is an evaluative research intended to find out the end of a policy program in order to determine recommendation of last policy by using CIPO model which includes four stages: (1) context, (2) input, (3) process, and (4) output. The research method used is case study by applying qualitative research that aims to make an accurate interpretation of the characteristics of the object under study. Findings on the evaluation context indicate that the program is generally running well, but some aspects of synergy and policy optimization as well as financing support from central and local government need to be improved. In the input evaluation, and evaluation process some aspects need to be improved because the findings show the weakness of some aspects is the result of lack of synergy and optimization of policy and support from local government. Interesting from the evaluation of output is that with some weaknesses in the input and process components, it turns out the evaluation findings output show Seek Mangke SEZ development can still run well. The recommendation of this research is to improve the quality of policy synergy / program of SEZ Seek development by improving several aspects that are categorized in each stage of evaluation.*

Keywords: *Program Evaluation, Special Economic Zone (SEZ) Sei Mangke, CIPO Model*

PENDAHULUAN

Kehadiran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan jawaban atas tantangan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Ke depan dinamika ekonomi domestik dan global mewajibkan bangsa ini untuk senantiasa siap terhadap sebuah perubahan. Posisi Indonesia di kancah ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, telah membawa konsekuensi bangsa ini untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan.

Dokumen MP3EI hadir selaras dengan visi pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, telah dipertegas melalui kehadiran MP3EI yang mengamanatkan visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

Melalui langkah yang digagas MP3EI, diharapkan percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan bangsa ini sebagai negara yang maju pada tahun 2025 dengan perkiraan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (Produk Domestik Bruto) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Tentu untuk mewujudkan kondisi demikian diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen untuk periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut, musti dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025 (Buku MP3EI 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 2011). Kombinasi pertumbuhan dan inflasi yang demikian merupakan cerminan karakteristik negara maju.

Sebagai wujud keselarasan MP3EI dengan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, perwujudan itu kemudian dituangkan ke dalam tiga misi yang menjadi fokus utamanya yaitu: (1) peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses dari potensi sumberdaya alam, geografis wilayah, dan sumberdaya manusia, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; dan (3) mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju *innovation-driven economy*.

Dari ketiga misi yang sudah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi nasional, akan dilakukan melalui empat

pilar kebijakan dalam MP3EI. Adapun keempat pilar penting sebagai strategi utama untuk mewujudkan misi yang sudah tertuang dalam MP3EI adalah: (1) Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah melalui Koridor Ekonomi dengan mewujudkan perluasan kegiatan ekonomi utama di 6 Koridor Ekonomi; (2) Penguatan Konektivitas nasional melalui percepatan konektivitas di delapan sektor utama yaitu: *energi, water, ICT, Road & Brige, Airport, Railway system, Logistic, and Seaport*; (3) Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK menuju ke tahap untuk bisa berdaya saing; dan (4) Regulasi sebagai penjamin dari percepatan dan perluasan kebijakan MP3EI.

Dengan konsep dan kebijakan yang telah dimiliki MP3EI diharapkan pembangunan daerah dalam konteks sistem ekonomi nasional dapat diwujudkan. Perwujudan pembangunan daerah dalam konteks sistem ekonomi nasional diperlukan dukungan/pelibatan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Karena dari pihak-pihak tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi di dalam sistem ekonomi nasional. Salah satu dari ketiga pihak tersebut tidak terlibat dengan baik, maka akan mempengaruhi atau berdampak pada pihak lainnya dan ini akan mempengaruhi pembangunan suatu daerah atau antar-daerah.

Salah satu kebijakan program/proyek yang telah hadir sebelumnya, dan merupakan pilar dari peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui perluasan kegiatan ekonomi utama pada MP3EI adalah Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang ditetapkan untuk penyelenggaraan fungsi perekonomian dan keterjangkauan fasilitas tertentu. Selain itu, amanah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari pasal 31 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang

mengamanatkan bahwa ketentuan Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang.

KEK sendiri dibentuk dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, (2) memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, (3) mempercepat perkembangan daerah, dan (4) modal terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain: industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka menarik investasi asing dan menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui pembangunan KEK diharapkan akan merangsang pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat di daerah-daerah, antara lain dengan meningkatnya penanaman modal (investasi), tersedianya lapangan kerja baru, tergalinya potensi-potensi ekonomi daerah, serta (pada akhirnya) akan terjadi peningkatan pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

KEK adalah bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah dan nasional yang terus didorong oleh pemerintah. Strategi pengembangan ekonomi daerah merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, keberadaan KEK selain mendorong perekonomian daerah juga dapat mendorong pengembangan wilayah/kawasan. Beberapa prinsip-prinsip dasar yang melandasi pengembangan wilayah yaitu:

(1) Sebagai *Growth Center*. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional. (2) Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pembangunan antardaerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah. (3) Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan. (4) Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona antara lain: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Salah satu KEK yang sudah dikembangkan adalah KEK Sei Mangke. KEK Sei Mangke ditetapkan dalam PP 29 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 dan merupakan KEK pertama di Indonesia yang diresmikan operasionalisasinya oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015. KEK Sei Mangke memiliki bisnis utama berupa industri hilirisasi kelapa sawit dan karet. Selain bisnis utama, terdapat beberapa bisnis pendukung seperti logistik, energi, aneka industri, dan pariwisata. Produk-produk utama yang

dihasilkan di antaranya adalah fatty acid, fatty alcohol, surfactant, biodiesel, dan biogas. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengembangan KEK Sei Mangke ini, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan yang sangat besar.

Dalam konsep pengembangan kawasan ekonomi khusus yang di dukung oleh MP3EI, efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dapat diukur dengan pendekatan penilaian kebutuhan. Dalam teori, Owen (2006) mendefinisikan suatu penilaian kebutuhan sebagai serangkaian prosedur sistematis untuk menetapkan tujuan prioritas dan pengambilan keputusan tentang kebijakan/program atau perbaikan organisasi dan alokasi sumberdaya prioritas didasarkan pada kebutuhan yang telah diidentifikasi.

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang ideal dan sinergi dengan kebijakan/program MP3EI, berbagai tingkatan komponen sumberdaya menjadi ruang lingkup dalam penilaian kebutuhan. Diharapkan berbagai tingkatan komponen sumberdaya tersebut sesuai dengan profil kebijakan/program pembangunan kawasan ekonomi khusus yang diinginkan. Untuk memenuhi kondisi ideal dalam pencapaian tujuan dan manfaat pelaksanaan kebijakan/program pengembangan kawasan ekonomi khusus maka perlu dilakukan evaluasi program.

Dalam proses kebijakan, evaluasi program merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai setiap aspek dari program pengembangan kawasan ekonomi khusus yang sedang dijalankan sebagai bagian dari sebuah proses pengenalan untuk memutuskan apakah kegiatan pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, atau *outcomes* sesuai dengan yang diinginkan (Widodo dan Jasmadi, 2008). Kemudian menurut Scheerens, Glas dan Thomas (2003), mengungkapkan bahwa apapun bentuk evaluasi terdiri dari pengumpulan

Evaluasi penting dilakukan untuk memastikan dan menjamin kesesuaian berbagai indikator pembangunan baik vertikal maupun horisontal pelaksanaan pembangunan KEK khususnya KEK Sei Mangke.

Dalam siklus proses kebijakan istilah evaluasi program dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang berusaha menyoroti apa yang terjadi sesudah program atau kebijakan dilaksanakan. Evaluasi dilakukan tidak sekedar menilai hal-hal yang teknis tetapi juga berkaitan dengan persoalan bagaimana hasil evaluasi Djaali dan Muljono (2008) menjelaskan evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hal senada diungkapkan oleh Owen menurut kriteria dan tujuan. Ada beberapa definisi evaluasi yang dikemukakan diantaranya Owen (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai keputusan akan nilai sebuah program (*evaluation as the judgment of worth of a program*) yang secara luas dapat dimaknai sebagai sebuah produksi atas pengetahuan dasar akan penemuan yang sistematis untuk membantu membuat keputusan sebuah program (*evaluation as the production of knowledge based on systematic enquiry to assist decision-making about a program*).

informasi yang sistematis dan pembuatan keputusan atas dasar informasi ini (*all forms of evaluation consist of systematic information gathering and making some kind of judgment on the basis of this information*). Lebih spesifik dalam pelaksanaan evaluasi perlu ada standar guna membandingkan dari beberapa kriteria, seperti diutarakan oleh Stake (2004:4), *evaluation is the comparison of the condition or performance of something to one or more standards*. Selanjutnya, menurut Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menyatakan: *Program evaluation is the systematic collection of information*

about the activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgments about the program, improve program effectiveness and/or inform decision about future programming.

Dari definisi tersebut, posisi evaluasi program merupakan kumpulan informasi sistematis tentang kegiatan, karakteristik, dan *outcomes* dari program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektivitas program dan/atau menginformasikan keputusan untuk keberlanjutan pemrograman ke depan. Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap program adalah untuk mengetahui sejauh mana program atau kebijakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pedampak dan sejauh mana pelaksanaannya, apakah sudah mendekati apa yang telah dijadikan tujuannya atau sebaliknya mengalami kegagalan.

Instrumen evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan KEK Sei Mangke yang paling utama adalah komitmen dan sumberdaya manusia pelaksananya. Terdapat lima aspek kapasitas yang harus dibangun dalam rangka mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan KEK Sei Mangke, yaitu (1) aspek pemahaman nilai kebijakan (*policy value*), (2) aspek pemahaman desain kerangka kerja kebijakan (*policy framework*), (3) aspek pemahaman manfaat kebijakan (*policy benefit*), (4) aspek pemahaman operasional dan teknis pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan (5) aspek pemahaman antisipasi dan penanggulangan dampak kebijakan (*policy mitigation*). Pada konteks, aspek (1) dan (2) telah dapat dicukupi melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun pada aspek (3), (4), dan (5) dirasa belum dapat dicukupi oleh pengalaman empiris. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Program/Proyek Pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus Sei Mangke dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan MP3EI 2011-2025 di Koridor Ekonomi Sumatera” dimaksudkan untuk memahami prosedur pengukuran manfaat kebijakan, prosedur operasional dan teknis pelaksanaan kebijakan dan prosedur mengantisipasi dan menanggulangi dampak kebijakan. Lebih lanjut kegiatan penelitian evaluasi ini kelak dapat menjadi *benchmarking* evaluasi program/proyek pembangunan lainnya. Adapun model penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan sistem bahwa program pembangunan dan pengembangan KEK Sei Mangke merupakan salah satu bagian dari sistem kebijakan pembangunan nasional yang mengacu pada context, input, process, dan output. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPO yang dikembangkan oleh Scheerens, Glas dan Thomas (2003), dimana model evaluasi memiliki kerangka perencanaan yang dibangun di atas empat pilar yakni konteks (context), masukan (input), proses (process) dan keluaran (output).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan menerapkan penelitian deskriptif. Model evaluasi program yang digunakan adalah CIPO (*Context, Input, Process, Output*). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada bulan Februari 2016. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen studi dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan observasi. Setelah hasil analisis kemudian menetapkan keputusan pada tiap tahapan evaluasi. Untuk mengukur keberhasilan program, ditetapkan kriteria standar obyektif. Data hasil analisis kemudian dikategorikan menjadi kurang baik, cukup baik, dan baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konteks (Context)

Kabupaten Simalungun sebagai lokasi KEK Sei Mangkei merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan diatur melalui PP No.29 Tahun 2012. Sebagai bagian dari kawasan ekonomi khusus yang mengemban amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan ini harus didorong dan sinergi dengan kebijakan MP3EI. Dalam MP3EI sendiri, keberadaan lokasi KEK Sei Mangke merupakan bagian dari koridor ekonomi Sumatera dan ditetapkan kedalam tema pengembangan koridor ekonomi sebagai sentral Produksi dan Pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Secara geosentris Sumatera diharapkan menjadi ‘Gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur serta Australia’.

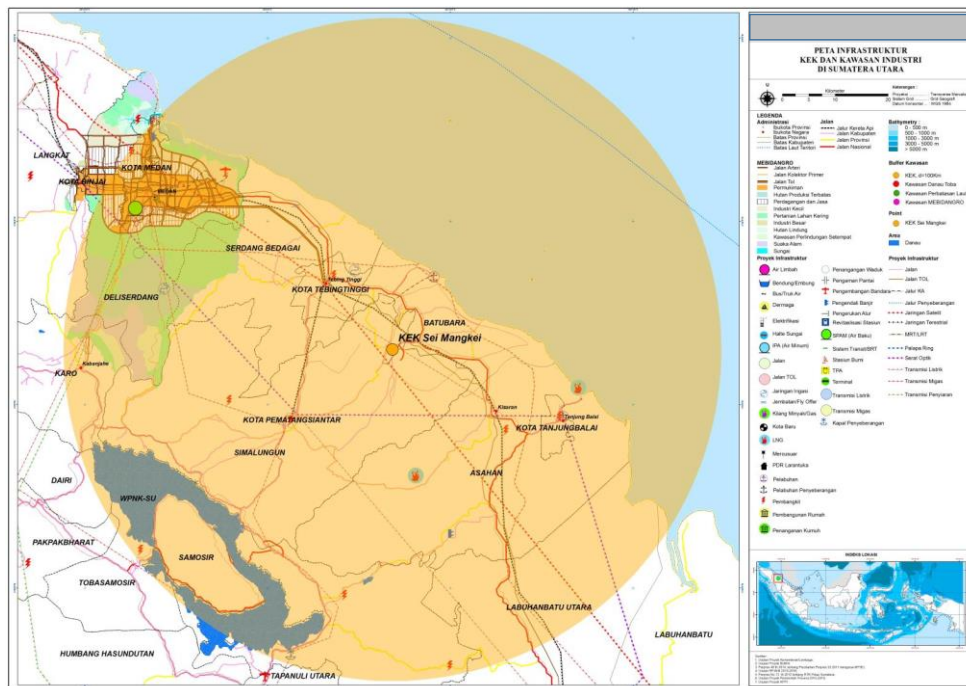
Secara umum koridor Sumatera berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan ekonomi utama seperti perkebunan kelapa sawit, karet serta batubara. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian pada koridor ekonomi Sumatera juga memiliki beberapa hal yang harus dibenahi yaitu: (1) Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan di dalam koridor baik antar perkotaan dan pedesaan ataupun antar propinsi yang ada dalam koridor, (2) Pertumbuhan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi (share 20 % dari PDRB koridor) yang sangat rendah dengan cadangan yang semakin menipis, (3) Investasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan (4) Infrastruktur dasar yang kurang

memadai untuk pengembangan industri antara lain jalan yang sempit dan rusak, rel kereta api yang sudah rusak dan tua, pelabuhan laut yang kurang efisien serta kurangnya tenaga listrik yang dapat mendukung industri.

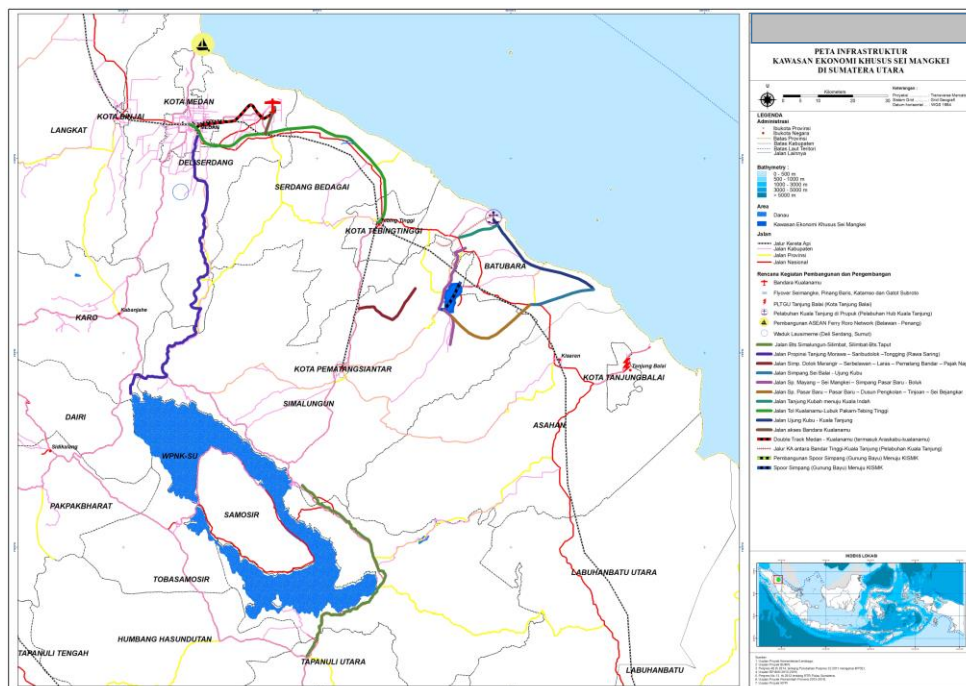
Masukan (Input)

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam pengembangan KEK Sei Mangke telah disusun melalui sinergi kebijakan perencanaan. Selain perundang-undangan yang mengatur KEK dan Kebijakan MP3EI, KEK Sei Mangke juga diperkuat oleh dokumen RPJMN 2015-2019. Sinergi dan keharmonisan antar kebijakan tersebut, merupakan bukti serius Pemerintah Pusat dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus ini. Lebih lanjut, peran Pemerintah Daerah telah ditunjukan melalui kebijakannya yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta rencana pengelolaan tata ruang dan tata wilayahnya.

Adapun temuan sinergi kebijakan yang dapat dibuktikan secara spasial pada saat penelitian berlangsung adalah adanya sinkronisasi antar proyek yang sudah disusun pemerintah pusat dalam kerangka mendukung pengembangan KEK Sei Mangke ini. Dalam Dokumen MP3EI 2011-2025 dan RPJMN 2015-2019 telah terdapat sekitar 29 proyek yang berada di luar KEK Sei Mangke yang dapat dipastikan akan mendukung operasional kawasan ini. Dari 29 proyek dimaksud, 21 proyek diantaranya merupakan proyek rencana pembangunan jangka menengah nasional yang akan dituntaskan hingga tahun 2019 oleh Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah peta sebaran proyek yang berhasil diidentifikasi pada saat penelitian ini berlangsung:



Gambar 1 – Peta Sebaran Rencana Proyek-Proyek di Luar KEK Sei Mangke Menurut Dokumen MP3EI 2011-2025



Gambar 2 – Peta Sebaran Rencana Proyek-Proyek di Luar KEK Sei Mangke Menurut Dokumen RPJMN 2015-2019

Proses (*Process*)

Temuan pada aspek pengorganisasian menunjukkan bahwa mekanisme pengorganisasian program

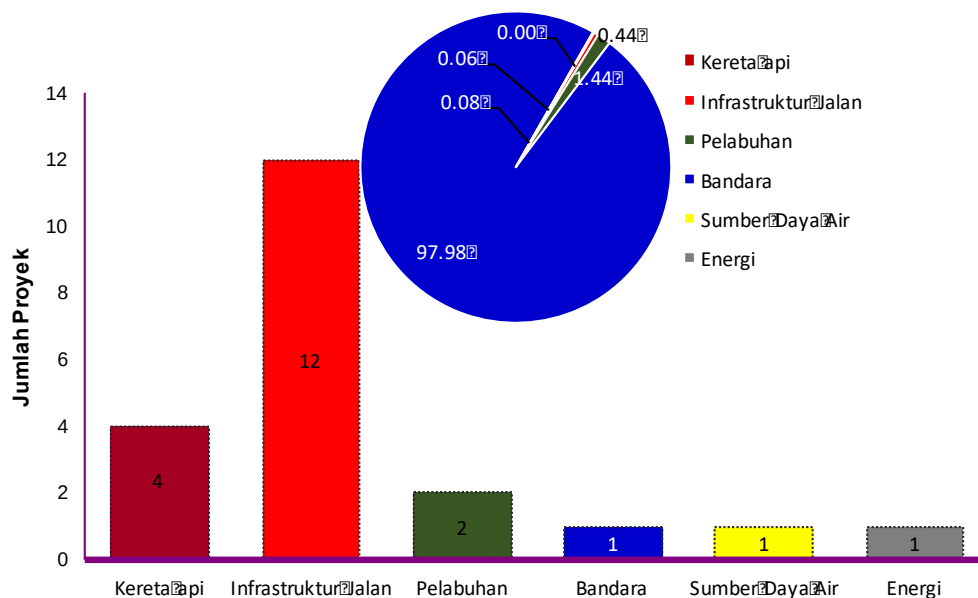
pengembangan kawasan ekonomi khusus dikelola secara *team work* oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari hasil studi dan informasi hasil wawancara, secara organisasi kinerja dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah berjalan. Bukti kinerja dapat terlihat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait telah terlaksana, dan

pengelolaan kantor administrator KEK Sei Mangke sudah berjalan.

Aspek berikutnya yang menjadi kajian evaluasi adalah aspek implementasi program/proyek. Untuk melihat gambaran dari aspek ini, digunakan data primer dan sekunder yang dianalisis melalui beberapa teknik analisis data.

Adapun perkembangan program/proyek pendukung KEK Sei Mangke adalah sebagai berikut:



Gambar 3 – Perkembangan Rencana Proyek-Proyek Pendukung KEK Sei Mangke Menurut Dokumen RPJMN 2015-2019

Kemudian aspek yang sama dilihat dari implementasi program proyek untuk proyek-proyek di dalam KEK Sei Mangke adalah sebagai berikut: (1) Pabrik Pupuk NPK Compound Kap. 100.000 ton/thn - PT. Cipta Buana Utama Mandiri (CBUM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama sektor kelapa sawit yang berencana melakukan investasi di dalam KEK Sei Mangke. Proyek ini rencananya akan dibangun dengan kapasitas 100.000 ton/tahun di atas lahan seluas 20 Hektar, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja

sebanyak 250 orang. Investasi untuk pembangunan proyek ini mencapai Rp 537 Miliar. Saat ini, investor masih mengubah perencanaannya untuk melakukan kajian secara menyeluruh. Secara fisik, pabrik ini belum ada wujud fisik; (2) Pembangunan Peningkatan PKS dari 30 ton/jam menjadi 75 ton/jam-merupakan proyek yang diinisiasi oleh PTPN III. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi rata-rata tahunan (tahun 2014/desember) Crude Palm Oil (CPO): 71.361,58 (ton) Palm

Kernel (PK): 16.460.96 (ton) Peningkatan Kapasitas Pabrik dari 30 ton/jam menjadi 75 ton/jam. Investasi untuk proyek ini mencapai Rp 109 Miliar; (3) Palm Kernel Oil (PKO) merupakan minyak yang berasal dari kelapa sawit. PTPN III menjadikan minyak dan inti sawit ini sebagai komoditi utama yang memberikan kontribusi kepada perusahaan. Pabrik ini memproduksi dengan kapasitas 400 ton/hari; (4) Pembangunan KISMK dilaksanakan akhir Desember 2010 ditandai dengan peningkatan kapasitas PKS dan Infrastruktur mencapai 100%, PLTBS 21,60%, dan PKO 10,37%. PT PTPN III akan membangun sejumlah fasilitas tambahan di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. Pembangunan beberapa fasilitas tersebut diperkirakan menggunakan investasi sebesar Rp 51 Miliar; (5) Proyek Pembangunan Industri Biodiesel ini merupakan proyek Pembangkit listrik tenaga Biomasa Sawit (PLTBS) kapasitas 2x 3,5 MW telah beroperasi tetapi dioperasional secara bergantian; dan (6) Pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang berlokasi di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. Pabrik ini dikelola sepenuhnya oleh PT. Unilever Oleochemical Indonesia yang merupakan anak perusahaan Unilever NV dan didirikan oleh Unilever untuk mengontrol *traceability* (penelusuran asal usul) dan segregasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan bisnis Unilever serta mempercepat transformasi industri dalam menerapkan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan ini, memiliki nilai investasi sebesar Rp 1,4 Triliun. Total Produksi yang dihasilkan mencapai 200.000 ton/tahun, dengan jumlah tenaga kerja saat ini sekitar 400-500 orang.

Temuan berikutnya pada aspek pengendalian dan pengawasan. Aspek ini, menempatkan pengendalian dan pengawasan pada kategori tinggi karena hasil evaluasi menunjukkan pengendalian

dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kawasan ekonomi khusus secara struktural dilakukan langsung oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan untuk program/proyek pendukung kawasan ekonomi khusus secara terstruktur melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah kepada Bappenas, BPKP, BPK, dan KSP. Dengan adanya pengawasan baik secara langsung maupun dalam bentuk pertanggungjawab kinerja pemerintah pusat maupun daerah, dapat dipastikan mengurangi kegagalan koordinasi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Posisi pengendalian dan pengawasan ini akan berkontribusi besar dalam proses perencanaan, koordinasi, komunikasi dan evaluasi.

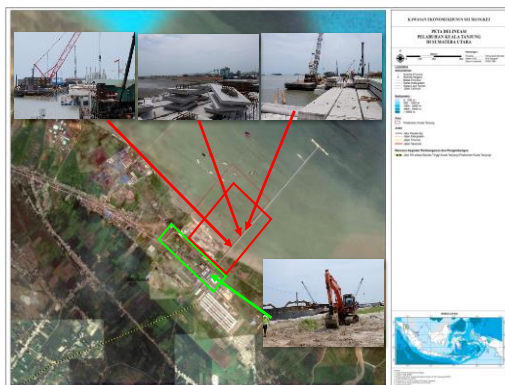
Keluaran (Output).

Hasil temuan untuk aspek keluaran (*output*), secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KEK Sei Mangke telah berjalan dengan baik, meskipun dampak secara langsung belum dapat dirasakan. Aspek keluaran yang dievaluasi di sini mencakup implementasi dan operasionalisasi dari proyek-proyek di dalam KEK Sei Mangke sendiri maupun proyek - proyek pendukungnya.

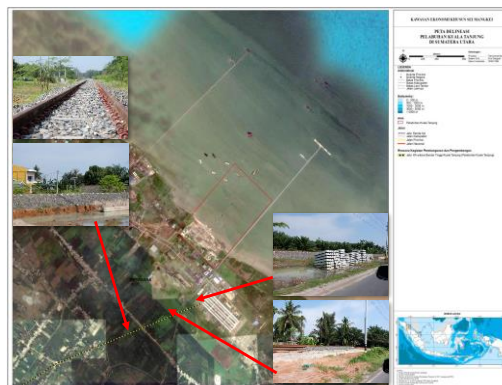
Temuan pada pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus ini dapat dilihat dari perkembangan status proyek yang sudah operasional. Untuk status perkembangan proyek pendukung pengembangan KEK Sei Mangke yang sudah divalidasi melalui kunjungan lapangan secara langsung adalah sebagai berikut: (1) Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I dilakukan oleh PT. Prima Multi Terminal selaku anak usaha dari PT. Pelindo I. Pembangunan Tahap I ini meliputi

pembangunan dermaga multipurpose (400 meter) dan pembangunan Trestle (2,7 km) Hingga saat ini (februari 2016) pembangunan telah mencapai 41% dengan nilai investasi Tahap I sebesar Rp 3 Triliun. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2016; (2) Pembangunan Ruas Rel Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung. Pembangunan ruas rel kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 21 km bersumber dari dana APBN sebesar Rp 400 Miliar. Dalam pembangunan proyek ini, pembebasan lahan sudah tercapai sekitar 60%. Sisanya yaitu sekitar 7,25 km terkendala oleh proses pembebasan lahan, yaitu: adanya demo dari beberapa masyarakat. Ditargetkan rel kereta api ini dapat beroperasi Januari 2017; (3) Pembangunan Ruas Rel Kereta Api KEK Sei Mangkei - Simpang Perlanaan. Ruas rel kereta api KEK Sei-Mangkei-Simpang Perlanaan sepanjang 2,9 km. Hingga saat ini perkembangan pembebasan lahan telah mencapai 80% dengan pembangunan

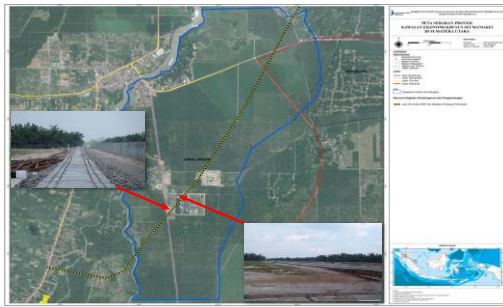
konstruksi fisik mencapai 51%. Kendala pada pembangunan rel kereta ini terletak pada pembebasan lahan terutama terkait permasalahan administrasi dan kepemilikan lahan. Ditargetkan rel kereta api jalur ini dapat beroperasi pada tahun 2017; (4) Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi berfungsi sebagai konektivitas antar wilayah. Untuk jalan tol Medan-Kualanamu dengan panjang 17 km, perkembangan pembebasan lahan sudah mencapai 80% dan pembangunan fisik jalan tol mencapai 32%. Pembangunannya sendiri dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk tol Kualanamu-Tebing Tinggi dengan panjang 44 km, pembebasan lahannya telah mencapai 82% dan pembangunan fisiknya mencapai 6%. Pembangunan ini dilakukan oleh PT. Jasa Marga Kualanamu Tol. Ditargetkan, jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (tol MKTT) ini dapat beroperasi pada tahun 2017 (diperkirakan Juni 2017).



Gambar 4a. LOKASI Proyek Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I



Gambar 4b. LOKASI Proyek Pembangunan Ruas Rel Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung



Gambar 4c. LOKASI Proyek Peningkatan Ruas Rel Kereta Api Sei Mangkei-Simpang Perlanaan



Gambar 4d. LOKASI Proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi-Kuala Tanjung

Selanjutnya, untuk perkembangan proyek di dalam kawasan pengembangan KEK Sei

Mangke yang sudah divalidasi melalui kunjungan lapangan secara langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 1 – Status Perkembangan Proyek-Proyek Pembangunan dan Pengembangan KEK Sei Mangke 2016

No	Nama Kegiatan	Dana (Rp Miliar)	Progress	Status (2016)
1	Pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa sawit (PLTBS) kapasitas 2x3,5 MW	91,00	100%	Pembangkit listrik tenaga biomassa sawit (PLTBS) kapasitas 2x3,5 MW telah beroperasi tetapi dioperasikan secara bergantian
2	Proyek pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK)	51,00	100%	KEK Sei Mangkei telah diresmikan pada tanggal 27 Januari 2015
3	Pembangunan peningkatan PKS dari 30 ton/jam menjadi 75 ton/jam	109,00	100%	Pabrik PKO telah beroperasi sejak bulan Januari 2012 dan berjalan dengan lancar
4	Pengembangan Industri PKO Kapasitas 400 ton/hari	70,00	100%	Pabrik PKO telah beroperasi sejak bulan Januari 2012 dan berjalan dengan lancar
5	Pabrik NPK (100.000)	537,00	On-Progress	Bahwa pabrik NPK belum dilaksanakan dimana calon investor masih mengubah perencanaannya untuk meaksanakan proyek yaitu untuk melakukan kajian secara menyeluruh
6	Pengembangan pabrik Oleochemical	2.045,00	On-Progress	Telah beroperasi sejak 26 November 2015
7	Pembangunan pabrik Oleokimia dan Pure Palm Oil (PPO)	3.627,00	100%	Sudah beroperasi 26 November 2015
8	Pembangunan pusat inovasi KEK Sei Mangkei	10,00	100%	Sudah digunakan.
9	Pengadaan peralatan laboratorium pusat inovasi Sei Mangkei	23,68	100%	Sudah digunakan.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapangan, (2016)

REKOMENDASI

Dalam komponen *Contex* hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek tujuan dan landasan serta skema program sudah memenuhi kriteria standar namun pelibatan pemerintah daerah masih belum optimal. Sehingga perlu ada optimalisasi penguatan dan integrasi kebijakan atau program baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan Rencana detail implementasi (RDI). Rencana detail implementasi (RDI) adalah pemetaan rencana aksi berbasis penanganan secara holistik, integratif, tematik dan spasial.

Dalam komponen *input* sumber daya program hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan aspek memenuhi kriteria standar program pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, hanya pengorganisasian dari sumber daya program yang terlihat belum optimal. Dengan demikian rekomendasi teknis yang dapat diambil adalah dengan melakukan pemetaan penanganan dalam RDI dilakukan berdasarkan patokan rencana COD proyek/kegiatan, penanggung-jawab proyek/kegiatan, identifikasi permasalahan penghambat proyek/kegiatan, upaya tindak lanjut sebagai bagian dari solusi atas permasalahan, penanggung-jawab penuntasan solusi, dan tenggat waktu penuntasan solusi. RDI tidak hanya memerhatikan penanganan percepatan sektor tunggal, namun juga memerhatikan penanganan percepatan sektor jamak yang terintegrasi secara holistik dalam suatu kawasan.

Dalam komponen proses khususnya implementasi program, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian ditunjukkan dengan implementasi program/proyek berjalan ideal dan berkelanjutan. Untuk komponen proses

dalam implementasi program dapat direkomendasikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah Pusat dalam hal ini merupakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas perlu mendorong penanganan prioritas untuk Pelabuhan Kuala Tanjung (PT. Pelindo I) dalam rangka percepatan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I agar difokuskan pada: (1) Penyelesaian target proyek pada bulan Maret/April 2017, agar kemampuan utilitas KEK Sei Mangke yang sudah tersedia dengan baik dapat segera terhubung dengan kapasitas tersedia di Pelabuhan Kuala Tanjung, (2) Proyek Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I saat ini membutuhkan penuntasan batas lahan antara PT. Pelindo I dan PT. Inalum. Solusinya adalah segera mempertemukan PT. Pelindo I dan PT. Inalum, (3) Penuntasan batas lahan antara PT. Pelindo I dan PT. Inalum terkait dengan penerbitan revisi Perda RTRW Kabupaten Batubara. Revisi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Batubara, (4) Penentuan batas lahan merupakan solusi untuk percepatan revisi Perda RTRW Kabupaten Batubara. Lebih lanjut, Perda RTRW yang baru akan menjadi dasar bagi Bupati Batubara menerbitkan ijin lokasi pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Industri di Kuala Tanjung, (5) Oleh sebab itu Kementerian PPN/Bappenas perlu mempertemukan para pihak dalam penentuan batas lahan dan penerbitan ijin lokasi. *Kedua*, Kementerian PPN/Bappenas perlu mendorong Kementerian Perhubungan guna percepatan pembangunan: (1) Proyek Pembangunan Ruas Rel Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, (2) Peningkatan Ruas Rel Kereta Api Sei Mangkei - Simpang Perlanaan, dan (3) Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi - Kuala Tanjung-KEK Sei Mangke.

Percepatan pembangunan 3 proyek infrastruktur tersebut dibutuhkan agar: Aktivitas KEK Sei Mangke dan Kuala Tanjung bila sudah berfungsi penuh pada pertengahan 2017 tidak mengganggu masyarakat local dalam memanfaatkan jalan lintas Sumatera dan jalan kabupaten, dan semakin meningkatkan daya saing KEK Sei Mangke dan Pelabuhan Kuala Tanjung dalam menurunkan biaya logistic yang menjadi beban pelaku industry pengolahan yang berada dalam KEK Sei Mangke maupun kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Dalam komponen *output* dilihat dari pencapaian program hasil penelitian menunjukan beberapa aspek sudah terpenuhi. Meskipun diperlukan percepatan dan penutasan untuk aspek-aspek tertentu. Dari komponen ini direkomendasikan perlu penuntasan untuk: Pertama, Pelabuhan Kuala Tanjung beroperasi dibutuhkan: (1) pengembangan kawasan pelabuhan, (2) listik andal, (3) kualitas jalan, (4) legalitas perijinan tata ruang, (5) jalan tol Medan-Kuala Tanjung, (6) kereta api, dan (7) legalitas Pelabuhan Hub Internasional. Kedua, Kereta Api beroperasi dibutuhkan: (1) pembangunan rel, (2) pembangunan *dryport*. Ketiga, pembangunan Jalan Tol Medan-Kuala Tanjung dibutuhkan ketersediaan lahan. Keempat, Listrik Andal dibutuhkan: (1) pembangunan gardu induk oleh PLN, (2) pembangunan PLTBS, dan (3) pembangunan PLTGU. Kelima, ketersediaan Gas dibutuhkan: (1) pembangunan jalur pipa, (2) ketersediaan

pipa dengan harga terjangkau, dan alternatif gas lain. Keenam, regulasi yang mendukung: (1) kemudahan administrasi, (2) perlindungan kawasan lindung, dan (3) pembangunan wilayah sekitar. Ketujuh, partisipasi masyarakat sekitar: tenaga kerja lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaali dan Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Murniati, A.R., dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Strategik dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009.
- Owen, John M. *Program Evaluation: Forms and Approaches*. Sydney: Allen and Unwin, 2006.
- Scheerens, Jaap, Gees Glas, dan Sally M. Thomas. *Educational Evaluation, Assessment, and Monitoring: A Systemic Aproach*. Lisse: Swets & Zeitlinger B. V., 2003.
- Stake, Robert E. *Standards-Based & Responsive Evaluation*. California: Sage Publications, 2004.
- Stufflebeam, Daniel L., dan Anthony J. Shinkfield. *Evaluation Theory, Models, & Applications*. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
- Widodo, Chosmin S., dan Jasmadi. *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.